



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Profil Perusahaan**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat Majalah Parlementaria**

Lahirnya buletin parlementaria tak lepas dari kehadiran awal majalah Parlementaria yang banyak terkait dengan pindahnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dari gedung lama yang terletak di Pintu VIII Senayan yang di mulai pada tanggal 15 April 1968 secara berangsur-angsur ke Jl. Gatot Subroto Jakarta yang kini ditempati. Momen kepindahan itu juga dijadikan momen untuk memperbaiki wajah buletin Parlementaria dari bentuk stensilan menjadi cetakan dalam bentuk majalah. Dengan persetujuan ketua DPR-GR R. Achmad Sjaichu dan pimpinan lainnya, pertengahan Mei 1968 lahirlah untuk pertama kalinya Majalah Parlementaria yang merupakan media dan mimbar langsung antara DPR-GR sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat dengan seluruh rakyat Indonesia.

Pada awal mula penerbitan majalah Parlementaria semua naskah dikerjakan dengan pengetikan manual, karenanya apabila kesalahan maka reporter harus menghapus dengan tip ex atau mengetik ulang. Foto yang disajikan kala itu juga dengan format hitam putih berukuran 21.5 cm x 15 cm. Oplah majalah pada waktu itu sekitar 1000 eksemplar, pendistribusiannya selain keseluruhan anggota dewan juta kepada Pemda di Indonesia, baik DPRD maupun masyarakat umum (Pradhana, 2010, hal. 5).

Perkembangan aktivitas dewan yang semakin meningkat, terasa membutuhkan format yang lebih besar, dan juga untuk menjaga legalitas penerbitan, maka pada 1985, Sekretariat Jenderal mendaftarkan Majalah Parlementaria ke Departemen Penerangan untuk mendapatkan Surat Tanda Terbit, sehingga pada 9 Agustus 1985 terbitlah STT Nomor 1026/SK/DITJEN PO/ STT/1985. Seiring terbitnya STT tersebut format pun berubah dengan ukuran 21 cm x 28.5 cm dan jumlah halaman 86 halaman dengan cover art paper cetak warna.

Oplah pun bertambah menjadi 1500 eksemplar dan penyebaran pun diperluas tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga Kedaulatan Besar. Walaupun kala itu majalah Parleментарia terbentuk masalah anggaran dan hanya terbit triwulan, tetapi berita yang dihasilkan masih bersifat aktual. Dengan dukungan anggaran, kini majalah Parleментарia diterbitkan setiap bulannya.

Memang tidak mudah bagi seseorang untuk mengasuh majalah Parleментарia karena harus mampu mengendalikan derasnya keinginan untuk menuangkan opini dan pandangan dalam goresan tulisan di majalah Parleментарia. Maka itu untuk memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan pembacanya, maka majalah Parleментарia menerbitkan Buletin Parleментарia sejak Mei 1991, yang diterbitkan tiap minggunya dengan oplah 1000 eksemplar yang disebarkan selain kepada anggota Dewan, MPR, DPD juga kepada Instansi Pemerintah, dan Kedutaan Besar. Melalui bagian Pemberitaan DPR RI yang dipimpin oleh Drs. Suratna M, Si yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Majalah dan Buletin Parleментарia yang langsung diawasi Pimpinan DPR RI, Marzuki Alie dan Sekretariat Jenderal kini baik majalah maupun buletinnya menjadi salah satu media resmi di DPR RI.

## **2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **Visi**

Majalah Parleментарia adalah suatu media sebagai alat publikasi lembaga DPR dan menjadikan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan dewan.

### **Misi**

- 1) Meningkatkan kemajuan mutu penerbitan Majalah Parleментарia sebagai organ resmi dari DPR RI.
- 2) Menyajikan informasi resmi dan otentik dengan cara selalu menitikberatkan pada fakta-fakta obyektif mengenai kegiatan apa yang ada dan terjadi di DPR.

### 2.1.3 Sejarah Singkat Website DPR RI

Dari informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Mohammad Djazuli, website resmi ini lahir pada 1998. Website resmi DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) muncul dengan mengikuti perkembangan zaman, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pranata Komputer Juhartono dan didampingi oleh Selo Hidayat, Mohammad Djazuli, dan Giovani

Website tersebut awal mulanya hanya mempublikasikan atau menginformasikan seputar sejarah DPR, tentang dan tugas Komisi, mengenai Sekretariat Jenderal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, website DPR menghadirkan berita-berita seputar kegiatan para anggota dewan, dan juga menampilkan agenda rapat setiap harinya di website tersebut. Dengan kecepatan berita yang disajikan [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di Gedung DPR RI.

Untuk mempertahankan eksistensi, Parlementaria memiliki situswebsite resmi yaitu [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) yang dapat diakses oleh khalayak. Media online menuntut majalah parlementaria untuk selalu meng-*update* berita-berita yang akan ditampilkan pada website tersebut.

#### Gambar 2.1

Tampilan Website Resmi DPR RI



(Sumber: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id))

#### 2.1.4 Alamat Biro Pemberitaan Parlemen

Majalah Parlementaria beralamat di jalan Jendral Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270 Indonesia. Nomor Telepon 021-571 5818, 021-571 5815, Fax 021-571 5687.

#### 2.1.5 Logo Biro Pemberitaan Parlemen

**Gambar 2.2** Logo Biro Pemberitaan Parlemen



(Sumber: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id))

Logo ini terbentuk sejak tahun 2004 dan memiliki beberapa makna. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa. Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pancasila. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang (pakaian). Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan) (Pradhana, 2010, hal 7).

Makna Pita dengan huruf-huruf DPR RI ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan

politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. Disamping warna dasar kuning emas, nampak dua warna dari Bendera kebangsaan kita yaitu Merah-Putih yang melambangkan, Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Apabila dirangkum warna-warna Merah-Putih dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ini tidak lain melambangkan keteguhan hati Dewan sebagai alat perjuangan untuk senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan Republik Indonesia. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berlandaskan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

## **2.1.6 Rubrikasi di bagian Website DPR RI**

### **2.1.6.1 Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Berita Badan Musyawarah dipublikasikan di website DPR RI membahas mengenai agenda DPR, memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR.

### **2.1.6.2 Badan Legislasi**

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Berita Badan Legislasi dipublikasikan di website DPR RI membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.

### **2.1.6.3 Badan Anggaran**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Pada agenda rapat tersebut terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Berita Badan Anggaran dipublikasikan di website DPR RI membahas mengenai alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada komisi.

#### **2.1.6.4 Badan Urusan Rumah Tangga**

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Berita Badan Urusan Rumah Tangga dipublikasikan di website DPR RI membahas mengenai pimpinan rapat menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

#### **2.1.6.5 Badan Kerja Sama Antar Parlemen**

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Berita Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dipublikasikan di website DPR RI membahas mengenai penerimaan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR. Pada saat melakukan rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.

#### **2.1.6.6 Mahkamah Kehormatan Dewan**

Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Pada saat melakukan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsipnya membahas mengenai musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota pada tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan juga diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

#### **2.1.6.7 Panitia Khusus**

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Dalam melakukan rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

#### **2.1.6.8 Komisi**

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Rubrikasi di *website* DPR RI bagian Komisi terdiri dari Komisi I sampai Komisi XI yang memiliki ruang lingkup dan mitra kerja yang berbeda (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016). Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang

mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

### **Komisi I**

Dalam pembentukan undang-undang (Legislasi), Komisi I DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016). Komisi I DPR RI dapat melaksanakan pembahasan terhadap RUU Usul Inisiatif Pemerintah, RUU Usul Inisiatif DPR, RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi).

### **Komisi II**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi II DPR RI adalah Dasar Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu. Berita yang dipublikasikan di *website* DPR RI juga sesuai ruang lingkup Komisi II.

### **Komisi III**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi III DPR RI adalah Hukum, HAM, dan Keamanan. Berita yang dipublikasikan di *website* DPR RI juga sesuai ruang lingkup Komisi III.

#### **Komisi IV**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi IV adalah Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan. Berita yang dipublikasikan di *website* DPR RI juga sesuai ruang lingkup Komisi IV.

#### **Komisi V**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi V adalah Infrastruktur, Perhubungan.

#### **Komisi VI**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi VI adalah Industri, Investasi, Persaingan Usaha. Berita yang dipublikasikan di *website* DPR RI juga sesuai ruang lingkup Komisi VI.

#### **Komisi VII**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi VII adalah Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup.

### **Komisi VIII**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi VIII adalah Agama, Sosial.

### **Komisi IX**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi IX adalah Kesehatan, Ketenagakerjaan.

### **Komisi X**

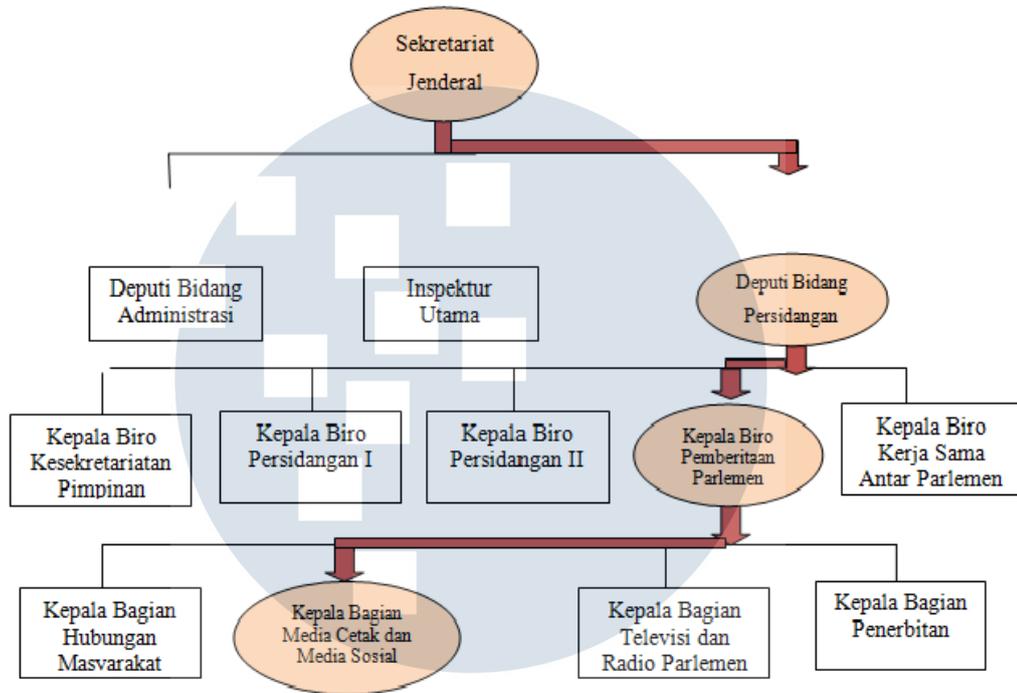
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi X adalah Pendidikan, Olahraga, Sejarah.

### **Komisi XI**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016), ruang lingkup Komisi XI adalah Keuangan, Perbankan.

## 1.1.7 Struktur Organisasi

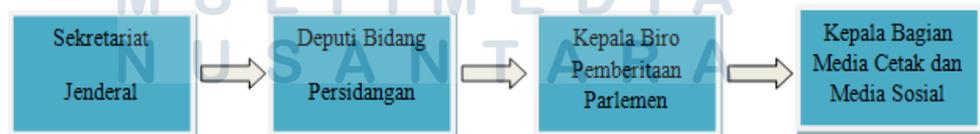
Gambar 2.3 Struktur Organisasi



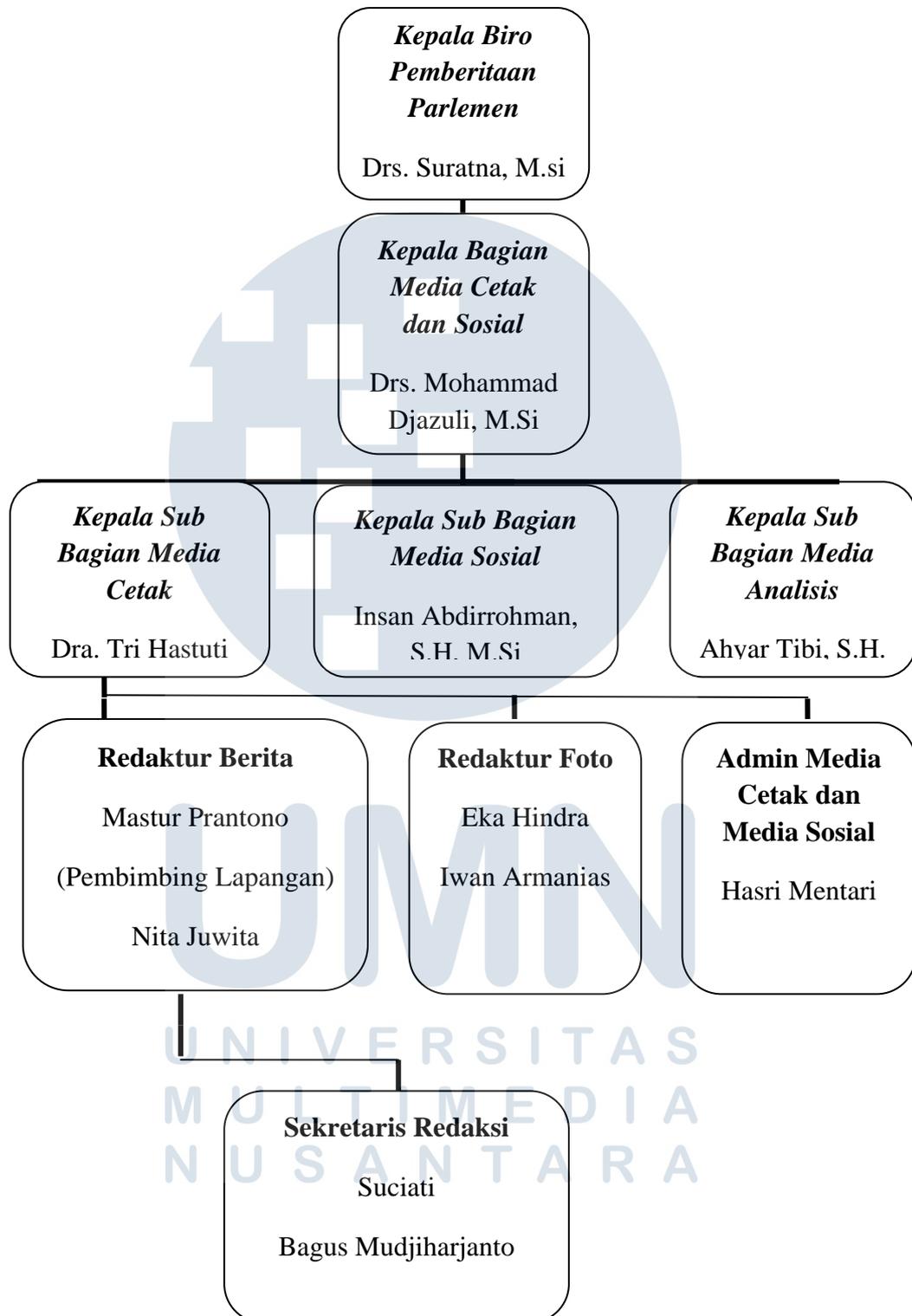
(Sumber: DPR, 2016)

### 2.1.7.1 Struktur Kerja Penulis

Gambar 2.4 Struktur Kerja Penulis



## 2.1.8 Deskripsi Unit Kerja



### **Reporter**

Virgianne M. Patuly	Ria Nur Mega
M. Husen	Suciati
Sofyan Efendi	D. Iriandi
Surahmat Eko	Agung S.
Hendra Sunandar	Rahayu Setiowati
Ardila Putri Y (Magang)	

### **Fotografer**

Jayadi Maulana	M. Andri
Naefuroji	Rizka A.
R. Kresno	Azka Restu F.
Runi Sari	Arief Rachman
Jaka. N	Andi M. Ilham.

(Sumber: Olahan Penulis)

Biro Pemberitaan Parlemen dikepalai oleh Drs. Suratna, M.Si yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi, radio, serta pengelolaan urusan penerbitan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, hal. 45).

Di dalam divisi Bagian Media Cetak dan Media Sosial dikepalai oleh Drs. Mohammad Djazuli, M.Si, bertugas untuk mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website serta melaksanakan analisis media (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, hal. 46). Divisi media cetak dan media sosial memiliki tiga sub bagian yaitu bagian media cetak, media sosial, dan media analisis. Pada saat melakukan kerja magang penulis ditempatkan di sub divisi bagian media cetak yang dikepalai oleh Dra Tri Hastuti.

Sub divisi bagian media cetak mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak DPR RI. Bagian media cetak Parlementaria bertugas untuk meliput, mempublikasikan suatu berita atau memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat lewat website DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)), Buletin Parlementaria yang terbit setiap minggu sekali,

dan juga Majalah Parlementaria yang terbit setiap sebulan sekali agar masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan para Anggota Dewan dan kegiatan apa saja yang terjadi di Gedung DPR RI.

Selain itu, penulis juga dibimbing langsung oleh Redaktur yang bernama Mastur Prantono. Peran redaktur tidak hanya untuk menyunting kalimat dalam berita yang dibuat reporter, tetapi juga mempunyai peran sebagai pembimbing dan pendamping dalam menuliskan berita (Djuraid, 2009, hal. 38). Redaktur harus mengarahkan reporter untuk mencari berita yang memiliki nilai tinggi. Begitu juga saat menulis, redaktur harus memberikan bimbingan tentang bagaimana menampilkan sebuah fakta di lapangan dalam tulisan yang baik dan menarik. Tentu saja bimbingan ini tidak cukup hanya melalui lisan, tetapi juga harus disertai dengan tindakan atau contoh yang baik. Redaktur sebagai pembimbing lapangan penulis dalam mengedit berita, redaktur sudah sangat baik menjalankan tugasnya memberikan contoh kepada penulis merangkai kalimat dengan baik agar enak dibaca.

Adapun perbedaan sub divisi bagian media cetak dan media sosial, media sosial yang memiliki tugas untuk mempublikasikan kegiatan rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR RI lalu diberi *caption* dan dimasukkan ke dalam media sosial seperti *Facebok*, *Twitter*, *Instagram*. Media sosial juga bertugas untuk membuat infografis dari kesimpulan hasil rapat yang dibikin semenarik mungkin yang nantinya akan dipublikasikan melalui Instagram DPR RI, bagian media sosial juga dituntut harus mempunyai kemampuan untuk menulis berita.

## **2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait**

Pada praktik kerja magang ini, penulis ditempatkan pada divisi bagian media cetak dan media sosial. Divisi bagian media cetak dan media sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial

- 2) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media.
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial website, dan analisis media.
- 4) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak
- 5) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial website
- 6) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di analisis media
- 7) Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial
- 8) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
- 10) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak DPR RI.

Adapun penulis ditempatkan ke bagian sub divisi media cetak. Bagian media cetak Parlementaria berfungsi untuk menyuguhkan informasi-informasi atau berita seputar Pemerintahan dan informasi mengenai kinerja para anggota Dewan kepada masyarakat.

Bagian media cetak Parlementaria lebih ditargetkan untuk masyarakat atau pembaca dewasa karena topik yang dibahas seputar dunia politik dan sub divisi ini mengelola aktivitas para anggota Dewan. Ruang lingkup tersebut terdiri dari Kasubag Media Cetak Tri Hastuti, dua redaktur diantaranya Mastur Prantono selaku pembimbing lapangan, dan Nita Juwita, beberapa reporter yang memegang kawasannya masing-masing seperti reporter Komisi I (Ayu, Hendra, Eko), Komisi II (Hendra), Komisi III (Ayu), Komisi IV (Devi Iriandi), Komisi V (Nita), Komisi VI (Eko), Komisi VII (Suci), Komisi VIII (Agung), Komisi IX (Ria), Komisi X (Sofyan), Komisi XI (Husen), Badan Anggaran (Eko), Badan Legislasi (Anne), dan dua reporter yang masih sama-sama melakukan praktik kerja magang.

Untuk mempertahankan eksistensi, Parleментарia memiliki situs *website* resmi [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) yang dapat diakses oleh khalayak. Media *online* menuntut majalah parlementaria untuk selalu meng-*update* berita-berita yang akan ditampilkan pada *website* tersebut.

Penulis bertugas menjadi reporter, berita yang penulis tulis kebanyakan masuk ke dalam website DPR RI [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), oleh karena itu penulis mempunyai deadline untuk menyelesaikan berita secara cepat lalu diperiksa ke pembimbing lapangan Mastur Prantono.

Ada 11 Komisi di mana penulis melakukan peliputan secara bergantian di Komisi tersebut dan penulis juga sudah menjabarkan beberapa tugas Komisi. Penulis ditugaskan untuk menulis berita dan melakukan peliputan sesuai dengan agenda atau jadwal rapat pada hari itu, penulis ditemani oleh satu reporter dan satu fotografer yang bertugas. Tetapi terkadang penulis diminta untuk menggantikan reporter yang berhalangan liputan.

Pada ruang lingkup divisi ini, selain membuat berita penulis terkadang membantu media sosial untuk mempublikasikan kegiatan rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR RI lalu diberi *caption* dan dimasukkan ke dalam media sosial seperti *Facebok*, *Twitter*, *Instagram*.